

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., Muslim, M. dkk, 2002. *"Good governance dan Penguatan Institusi Daerah"*. Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Bazwir, Revrisond. 1999. *Akutansi Pemerintah Indonesia*.Jogjakarta : Edisi tiga BPFE .
- Basri ,Mutia.2008.*Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*.jurnal ilmu administrasi.volume 8,No.1 januari.FE Universitas riau,pekanbaru.
- Bastian,Indra,2005.*Sistem Akutansi Sektor Publik*.Jakarta : Salemba Empat.
- Coryanata,isma.2007,*Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat Dan Transparasi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah(APBD)*.Simposium Nasional Akutansi X.Makasar.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Erlina,2008.*Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan kinerja dewan peranan partisipasi masyarakat di sumatera utara*,jurnal wawasan,volume 13 No.3 februari. Medan : Dosen FE USU.
- Fatchurrochman, Agam, 2002. *"Manajemen Keungan Publik. Materi Pelatihan Anti Korupsi"*.Indonesian Coroption Watch.
- Ghozali,Imam,2005."*Structural equation modeling teori,konsep dan aplikasi dengan program 8.54*".Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarti,Damodar,2001.*Ekonomitrika Dasar*. Jakarta : penerbit Erlangga.
- Indriantoro dan Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*. Jogjakarta : BPFF.
- Junaedi, 2008. *Ekonometrika*. Universitas Jambi : Modul
- Mardiasmo, 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jogjakarta : Andi.
- Mardiasmo, 2002. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andy .

Musthofa, Chabib, 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Modul.

Nur, muhammad, 2011. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi.

Pramono, Agus H., 2002. *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Malang : Universitas Brawijaya.

Rubin, Irene, 1996. Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s. *Jurnal Public Budgeting & Finance*. Summer, hal. 112-132.

\_\_\_\_\_, 2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*, Citra Umbara, Bandung.

-----, *Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_, 2001. *Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : Citra Umbara.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.

\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan DPRD Kab. Karanganyar No. 188.4/16 tahun 2009*. DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 2009.

Sugiyono, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sulistoni, G., 2003. *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, Nusa Tenggara Barat : SOMASI.

Sekaran, Uma, 2000. *Research Methods for Business : Skill Bulding Approach*. Third Edition. New York : John Wiley & Sons Inc.

Truman, David B, 1960. *The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion*, Alfred A Knof, New York , pp 333, dalam Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan*.

Werimon, simson, 2005. *Pengaruh Partisipasi masyarakat dan Transparasi Kebijakan publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Tesis S2 Tdak Publikasi, Program pasca Sarjana magister sains Akutansi universitas diponegoro semarang.

Werimon, 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makasar : *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Yudoyono, Bambang, 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.htm>.

Yuwono, Sony, dkk 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Edisi pertama : Jawa Timur Bayumedia.